

Nasib FTZ Belum Jelas

Apindo: Regulasi Jangan Berubah-Ubah

RIFKI SETIAWAN L, Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam belum bisa memastikan seperti apa nasib status dan fasilitas *Free Trade Zone* (FTZ) Batam jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam diberlakukan. Apakah

FTZ tetap berlaku, atau secara bertahap fasilitasnya akan dihapus.

"Kami belum tahu apakah itu tetap dipertahankan atau bertahap dihilangkan. Ini harus diperjelas," kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (7/5).

Pada hal persoalan ini menjadi salah satu alasan utama bagi para pengusaha Batam dalam menolak KEK Batam. Sebab, saat ini, ada beberapa pabrik yang tidak mungkin masuk ke area KEK karena lokasinya berada di tengah permukiman warga.

Namun Lukita menekankan, kemungkinan paling besar adalah FTZ Batam akan dihapus jika KEK diberlakukan. Itulah sebabnya pemerintah menugaskan BP Batam menyelesaikan masa transformasi FTZ Batam menuju era KEK.

"Tapi bisa saja (FTZ tetap)

berlaku sampai dengan waktu tertentu," katanya lagi.

Untuk itu, BP Batam akan segera membahas hal ini dengan Dewan Kawasan (DK). Sehingga kepastian status dan fasilitas FTZ Batam akan segera terjawab.

■ Baca **NASIB** ...Hal 4



42

CORNER KICK

Guntur Marchista Sunan

Direktur Batam Pos

na di GBT

Nasib FTZ Belum Jelas

Sambungan dari hal 1

Selain soal status dan fasilitas FTZ, kata Lukita, pengusaha Batam juga mempersoalkan siapa yang nanti akan menjadi operator KEK di Batam. Sebab, menurut aturan, seharusnya dibentuk otoritas baru yang mengurus KEK Batam, di luar BP Batam dan Pemko Batam.

Namun, menurut Lukita, siapa pelaksana KEK Batam bukanlah masalah yang penting. Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana KEK diberlakukan untuk mendorong ekonomi Batam tumbuh 7 persen pada 2019 mendatang.

"Konsen terbesar KEK nanti, selain lebih banyak insentif juga dapat memperlancar arus barang," katanya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, BP Batam harus menjelaskan semua konsekuensi jika KEK Batam diberlakukan.

"Jika FTZ menjadi KEK, dan di luar KEK menjadi FTZ, siapa yang menjadi operator FTZ, KEK?" tanya Jadi, Senin (7/5).

Menurut Jadi, jika fokus KEK adalah menambah kemudahan dan insentif bagi pengusaha, sebaiknya fasilitas itu ditambahkan ke fasilitas FTZ. Sehingga FTZ Batam tetap berlaku dengan fasilitas yang lebih banyak.

"Yang diinginkan investor dan pengusaha itu," katanya. Ia juga meminta BP Batam menjelaskan kepada masyarakat bahwa penerapan KEK tidak otomatis menghapus Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Termasuk UWTO di permukiman.

"Yang ada, jika tidak ada FTZ maka harga kebutuhan pokok dan barang lainnya akan jadi

lebih mahal," katanya.

Sementara kalangan pengusaha di Batam tetap menolak transformasi FTZ menjadi KEK di Batam. Mereka menganggap perubahan regulasi yang mendadak seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para investor yang mau masuk atau sudah eksis di Batam.

"Saya rasa janganlah beri regulasi yang menyakitkan, mengerikan, dan berubah-ubah," kata anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin Hasibuan, di Hotel Radison Batam, Senin (7/5).

Menurut Abidin, persoalan ekonomi Batam bukanlah terletak pada konsep ekonomi FTZ. Melainkan pada persoalan ekonomi global yang tengah lesu.

"Mengapa harus diubah-ubah. FTZ itu baik-baik saja, mengapa harus diubah jadi KEK. Ini persoalannya harus segera dicari," ucapnya.

Senada dengan Abidin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengungkapkan transformasi FTZ menuju KEK menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha.

"Jadi ini pandangan dunia usaha secara keseluruhan. REI melihat isu tentang KEK Batam ini belum jelas," katanya.

Achyar memandang bahwa transformasi ini dilakukan secara terburu-buru tanpa mengindahkan pendapat dari para pengusaha. KEK ini belum ketahuan seperti apa bentuknya dan seperti apa regulasi yang akan diterapkan di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.

Ketidakpastian ini membuat para pelaku usaha galau. Dari pengusaha galangan ka-

pal hingga pengusaha industri manufaktur merasa KEK ini masih teka-teki. Sedangkan di era global yang dinamis seperti saat ini, teka-teki hanya menimbulkan tanda tanya.

"Jika galangan kapal hingga manufaktur dirugikan karena pemberlakuan KEK nanti, maka industri properti juga bisa rugi. Karena properti tidak bisa berdiri sendiri," ucapnya.

Menurut Achyar, pihaknya memang menolak KEK, tapi juga menyatakan FTZ perlu banyak pembenahan di sana sini. "Kami sampaikan FTZ juga kuno. Selama era FTZ, pertumbuhan ekonomi turun terus," ungkapnya.

Baik FTZ maupun KEK sama-sama merupakan model ekonomi. Sehingga langkah yang tepat adalah dengan memperbaharui model ekonomi yang ada, bukan malah mengubahnya ke model ekonomi lain yang belum jelas seperti apa. "KEK yang sudah berjalanpun juga belum pernah ada kisah suksesnya," ujarnya.

Ia mengimbau kepada pemerintah pusat dan BP Batam untuk berdialog berkali-kali dengan pengusaha. Tujuannya adalah untuk menemukan model ekonomi yang tepat untuk diterapkan di Batam. "Harus berkali-kali bertemu biar pas. Yang penting kan perubahan itu diadakan untuk perbaikan," ucapnya.

Secara garis besar, transformasi FTZ ke KEK bukan hanya mengubah sektor ekonomi Batam. Tapi juga akan berdampak pada sektor sosial dan sektor legalitas terkait badan pengelola KEK nantinya.

Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam Osman Hasyim memiliki pandangan yang berbeda. Ia setuju dengan konsep awal yakni KEK di dalam FTZ. Namun sekarang

ini konsepnya harus dipertegas agar menimbulkan kepastian hukum di mata investor.

"Jika FTZ dihapus akan memberatkan masyarakat Batam yang sudah merasa terbebani dengan pungutan PBB dan UWTO," katanya.

Alangkah baiknya jika fasilitas FTZ yang ada saat ini ditambah sekaligus mencari titik lemah FTZ selama ini. "Lebih baik dipertahankan dan diperkuat lewat pemberian insentif," katanya.

Dan praktisi hukum Batam Ampuan Situmeang mengatakan pemerintah sangat perlu berdiskusi dengan publik soal transformasi FTZ menuju KEK ini. Sebab Batam berada dalam status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BP Batam.

"Kalaupun KEK ditetapkan dibutuhkan administrator pengelola KEK yang belum jelas strukturnya siapa di dalamnya, belum tentu pemerintah daerah yang menetapkannya," katanya lagi.

Lalu mengenai anggaran pengelolaan KEK juga belum jelas hingga saat ini, apalagi bentuknya nanti. Belum jelas apakah nanti dianggarkan di APBD atau di APBN. Lagipula, jika KEK diberlakukan di Batam, nantinya akan tiga institusi yang berwenang membangun Batam, yakni BP, administratur KEK, dan Pemko Batam.

"Ini menambah karut marut dan ketidakpastian hukum di Batam," ungkapnya.

Ia hanya mengingatkan, masih banyak persoalan ekonomi Batam yang mesti dibenahi. Mulai dari persoalan lahan hingga masalah perizinan.

"Kok malah menambah persoalan baru lagi dengan KEK di dalam FTZ," ungkapnya lagi. ***

Bisa Serap 50 Ribu Pekerja

Sambungan dari hal 1

"24 perusahaan ini berasal dari China dan merupakan yang terbaik. Xiaomi sangat mementingkan kualitas kontrol ketat sehingga 24 perusahaan ini adalah kelas dunia," ungkapnya.

Untuk tahap awal ini masih bersifat peninjakan. Dan berikutnya adalah tahap negosiasi lebih lanjut. Namun Steven menegaskan jika 24 perusahaan ini berkembang di Batam, maka akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan

brand lokal yang lebih berkelas bagi Xiaomi.

Senada dengan Steven, Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan keinginan Xiaomi tersebut selaras dengan keinginan BP Batam yang ingin membangun Batam sebagai pusat logistik.

"Kita butuh investasi, mereka mau bentuk rantai pasok. Jika bisa buat di Batam, maka investasinya bisa mencapai 315 juta dolar Amerika dan rekrut karyawan dari 10 ribu hingga 50 ribu karyawan," jelasnya.

Kombinasi antara BP Batam

dengan Xiaomi dan Sat Nusapersada sangat tepat. Karena dalam tempo panjang, pengembangan industri *smartphone* ini bisa dikembangkan menuju industri-industri lain seperti industri penunjang *smartphone*, industri komponen *smartphone*, dan industri semikonduktor.

"Makanya kita tengah bangun ekosistem rantai pasokan dengan mempersiapkan infrastrukturnya. Maka nanti industri hulu akan datang dengan sendirinya," ucapnya.

Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Ha-

sibuan sangat mengapresiasi sekali niat Xiaomi yang membuka peluang pengembangan industri *smartphone* di Indonesia.

"Dengan begini biayanya bisa lebih kompetitif. Maman saat ini untuk bahan bakunya masih impor. Namun jika buat rantai pasok di sini, bisa lebih murah," katanya.

Abidin menegaskan targetnya jika kerja sama ini berjalan nanti akan memproduksi 6 juta unit *smartphone*. "Mengapa harus impor, bisa buat dalam negeri tanya. (leo)

Bukan untuk Politik

HAWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH
TANGGAL MERAH DAN HARI MINGGU LIBUR ***

CP SAMSAT ANTAR PULAU 0813 8526 6278 ***CP SAMSAT BERGERAK 0812 7062 0021***0813 7498 7711 (BUS SAMLING) DAN 0813 7264 5446 (MOBIL SAMLING)

MAKLUMAT PELAYANAN: KAMI PERSONIL SIE STNK BERKOMITMEN DAN BERUPAYA DENGAN SINGGULH-SINGGULH MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA AKUNTABEL, TRANSPARAN, TEPAT WAKTU DAN TELITI SERTA BEBAS PUNGLI. DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA POLANTAS

TERAS

Batam Mengaji Targetkan 20 Ribu Jamaah

SEKUPANG (BP) - Forum Silaturahmi Dewan Kemakmuran Masjid Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Batam Mengaji, Sabtu (12/5) mendatang. Acara ini menargetkan 20 ribu jamaah bisa bergabung.

Ketua panitia Sawindu Yudha mengatakan menyambut bulan suci Ramadan pihaknya bersama Pemko Batam ingin menyambut bulan yang penuh berkah dengan kegiatan mengaji.

Ia menjelaskan acara akan dilaksanakan di Dataran Engku Putri, Batam Center. Acara akan dimulai pukul 15.00 WIB dan diawali dengan salat Ashar bersama di Masjid Raya Batam. "Mengajinya kami mulai jam 16.00-18.00 WIB.

■ Baca **BATAM**...Hal 11

PPDB Sistem Zonasi Sudah Final

Mampu, Orang Tua Diminta Sekolahkan Anak di Swasta

BATAM KOTA (BP) - Penerapan sistem zonasi pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun ajaran 2018-2019 sudah final. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan pembagian zonasi ini masih tahap dirampungkan.

"Sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah. Kini di tingkat kecamatan pembagian zonasi ini masih dirampungkan. Yang jelas, dengan sistem zonasi ini, nanti yang ada dalam wilayah tertentu saja yang diterima," kata Hendri, Senin (7/5).

Dijelaskannya, meski ber-



F. YULITAVIA/BP

Hendri Arulan

basis wilayah tak berarti dibagi per kecamatan. Sebab pada satu kecamatan jumlah sekolah tidak sama. Contohnya, di wilayah tertentu yang kurang sekolah

■ Baca **PPDB**...Hal 11

Batam Mengaji Targetkan 20 Ribu Jamaah

Sambungan dari hal 9

Selama dua jam tersebut jamaah akan mengaji dengan dipandu salah satu peserta nantinya," sebutnya.

Tidak saja umat muslim Batam, pihaknya juga mengundang umat muslim dari Malaysia dan Singapura untuk bergabung. Nanti di tengah dataran akan ada koreografi yang membentuk lafaz Allah dari barisan umat.

"Jadi jamaah yang hadir akan

membentuk lafaz Allah. Kami berusaha mengadirkan event yang sangat besar, biasanya mengaji hanya delapan ribu jamaah, kali ini kami mencoba mengundang 20 ribu jamaah," beber Yudha.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batam Erizal mengatakan sangat menyambut baik kegiatan yang penuh berkah ini. "Momenya sangat pas, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan," ujarnya.

Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam Yudi Admaji mengungkapkan dalam acara Batam mengaji ini, Pemko Batam sangat mendukung. Pemko Batam akan membantu penyediaan tenda hingga sound system selama acara.

"Kami mengimbau seluruh umat muslim yang ada di lingkungan Pemko Batam untuk hadir dan membawa Alquran dan alas tempat duduk sendiri," tambahnya. **(yui)**

PPDB Sistem Zonasi Sudah Final

Sambungan dari hal 9

dimungkinkan bisa mendaftar pada sekolah kecamatan terdekat, dengan ketentuan kuota masih tersedia dan calon peverte didik memenuhi persyaratan.

"Kalau tahun dulu sistem rayonisasi, yang di Tiban bisa loncat ke SMP N 6 di Seipanas. Sekarang tidak bisa lagi, ini gunanya zonasi. Sekarang, daftar di zonasinya, dan melalui seleksi," jelasnya.

Hendri menyampaikan, zonasi juga tidak berdasarkan radius, karena pada wilayah tertentu ada sekolah negeri yang berdekatan. "Kalau pakai radius susah juga, karena jumlah sekolah di satu wilayah tidak merata. Jadi penerapan zonasi bersifat dinamis," ucap dia.

Selain itu, Hendri menyampaikan, bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri, diharapkan para orang tua legowo untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. "Sudah usaha tapi tidak tertampung juga (di sekolah negeri), ya ke sekolah swasta saja. Memang sekolah negeri terbatas," terangnya.

Untuk mematangkan sistem zonasi ini, Jumat (11/5) nanti Disdik akan mengumpulkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Camat se-Batam guna mensosialisasikan PPDB.

Pakai Sistem Rangking

Camat Sekupang Muhammad Arman mengatakan terus berkoordinasi dan membahas persiapan PPDB dengan kepala sekolah SMP negeri yang ada di wilayah Sekupang, salah satunya dengan kepala SMPN 25 Sekupang. "Kemarin sudah ketemu untuk membahas penerapan zonasi ini," kata dia kemarin.

Arman mengungkapkan berdasarkan rapat waktu itu, PPDB

zonasi ini tetap melalui sistem rangking, apabila jumlah calon siswa melebihi kuota yang tersedia. "Jadi tetap mengutamakan siswa yang dekat dengan sekolah. Namun jika melebihi kuota maka akan merangking siswa tersebut," jelasnya.

Mengenai sistem zonasi ini, pihaknya belum menuntaskan pembahasan dengan pihak sekolah. Namun demikian jika dibutuhkan, pihak kecamatan akan membantu kelancaran PPDB ini.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Batam Wiwiek Darwiyati mengatakan sistem rangking ini diberlakukan kalau jumlah siswa yang ada di zonasi SMPN 3 lebih banyak dari daya tampung yang tersedia. "Tetap siswa yang terdekat dari sekolah yang diterima. Hanya saja tergantung kuota," kata dia.

Tahun lalu pihaknya menerima sedikitnya sembilan kelas dengan rata-rata 38 orang per kelas. "Tahun ini kemungkinan segitu juga," sebutnya.

Sementara itu, di Kecamatan Sagulung juga masih menggodok persiapan PPDB dengan sistem zonasi. Terutama terkait lokasi sekolah yang berdekatan dengan wilayah Kecamatan Batuaji, perlu dikaji secara mendalam agar tidak tumpang tindih nantinya.

Camat Sagulung Reza Khadafi menuturkan, dari enam kelurahan yang ada baru Kelurahan Tembesi yang sudah siap memetakan sistem zonasi sekolah di wilayah mereka. "Lima kelurahan lain masih dalam proses. Agak rumit karena sekolah-sekolah di lima kelurahan itu berdampingan dengan Kecamatan Batuaji. Butuh kajian yang matang agar tidak tumpang tindih," kata Reza kemarin.

Untuk Kelurahan Tembesi total ada delapan sekolah negeri, yakni lima Sekolah Dasar (SD), dua SMP, dan

satu SMA. "Tembesi tidak terlalu ribet karena fokus ke wilayah kelurahan mereka saja. Jadi mudah pembagian zonasinya," ujarnya.

Namun demikian ada kendala lain yang akan dihadapi ke kelurahan tersebut, yakni daya tampung siswa yang akan masuk SMA. SMA negeri yang hanya satu tentu peminatnya membludak. "Tapi masalah itu sudah kita antisipasi juga. Kalau memang peminat membludak tentu harus terapkan sistem rangking. Anak-anak terdekat sekolah harus diprioritaskan," ujar Reza.

Untuk lima kelurahan lainnya, yakni Seilangkai, Seipelenggut, Seibinti, Seilekop, dan Sagulung Kota, Reza berharap agar secepatnya diselesaikan agar persoalan itu segera disampaikan ke Disdik Kota Batam dan Provinsi. "Kami berharap supaya sekolah-sekolah yang ada di lima kelurahan itu segera melapor dan memetakan zonasinya. Jika ada persoalan biar cepat disampaikan ke Disdik," jelasnya.

Sekolah Belum Merata

Anggota Komisi IV DPRD Batam Bobi Aleksander Siregar mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 terkait PPDB berdasarkan zonasi belum bisa diterapkan di Batam. Alasannya, pemerataan sekolah negeri dengan jumlah peserta didik di setiap kecamatan belum berimbang.

"Ada satu kecamatan punya delapan sampai sepuluh sekolah negeri. Sementara ada juga satu kecamatan yang hanya punya satu SMP negeri saja. Kalau ini diterapkan bagaimana mungkin bisa menampung peserta didik," katanya kemarin.

Diakui Bobi, hasil dari pembahasan Komisi IV DPRD Ba-

tam beberapa waktu lalu, dengan diberlakukan sistem seperti ini akan menimbulkan polemik dan masalah di masyarakat. Terlebih pada pasal 24 Permendikbud tentang batasan jumlah siswa dalam satu ruang kelas, dari yang tadinya 38 dibatasi jadi 32 siswa. "Kita lihat rasio kelulusan dengan jumlah bangku sekolah negeri yang tersedia saat ini tidak sebanding," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam rapat dengan Disdik Batam beberapa waktu lalu, Komisi IV sepakat agar pemerintah daerah melibatkan kontribusi sekolah swasta. Sebab, selain menerima insentif guru swasta yang dikucurkan dari APBD sebesar Rp 43 miliar, sekolah swasta juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari pemerintah pusat.

"Kalau semuanya ditanggung ke sekolah negeri, sementara harus mengikuti permendikbud. Mau seperti apa zonasi yang akan dibuat," kata Bobi lagi.

Untuk itu, ia meminta kede-wasaan orang tua murid. Sekiranya bagi mereka yang mampu secara finansial seoyangnya menyekolahkan anaknya di swasta. Sehingga siswa yang tidak mampu bisa bersekolah di negeri. Selain itu harus ada keberanian Disdik untuk merekomendasikan siswa yang dirasa sudah mampu agar bersekolah di swasta. "Kan bisa dilihat dari biodata anak, ini anak PNS, anak pejabat, rekomendasikan ke sekolah swasta," lanjut Bobi.

Kalau tidak seperti ini, akhirnya apa? Anak yang tidak mampu sekolah di swasta, sehingga orangtuanya harus mencari segala cara untuk tetap menyekolahkan anaknya. "Termasuk meminjam uang kesana-kemari. Kondisi ini yang paling banyak terjadi," jelas Bobi. (yui/eja/rng/iza)

Mulai Beroperasi, Tak Kunjung Ditertibkan

Kios Liar di Sekitar Aviari

BATAMKOTA (BP) - DPRD Kota Batam menuntut ketegasan Camat Batuaji dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam untuk menertibkan kios liar di sekitar Pasar Seken Aviari, Batuaji. Sejak dibangun Maret lalu, belum ada tindakan tegas dari petugas. Kini, satu unit kios liar di sana sudah mulai ditempati penyewa dan beroperasi.

"Harusnya sebelum ditempati itu harus ditertibkan. Jangan nanti setelah banyak yang menempati baru dilakukan penertiban," kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean, Senin (7/4).

Ia meminta camat benar-benar serius untuk menertib-

kan kios-kios tersebut dan bukan hanya janji-janji kepada masyarakat. "Jika ini dibiarkan, maka akan semakin banyak kios liar di Batuaji. Makanya kita minta Camat Batuaji tegas," katanya.

Menurut Werton, kios liar yang ada di beberapa titik di Batuaji sangat meresahkan masyarakat. Selain mempersempit jalan, keindahan Kota Batam juga semakin berkurang.

"Apalagi untuk bangun kios ini banyak pohon-pohon yang ditebang. Padahal, kita kekurangan ruang terbuka hijau," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi juga menyayangkan kios liar yang berada di sana. Menurutnya,

saat ini kios liar tidak boleh dibangun. Apalagi, saat ini Ranperda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sedang dibahas.

"Sebentar lagi mau disahkan. Itu tidak boleh di sana. Nanti penempatan pedagang kaki lima akan diatur. Makanya petugas harus tegas dalam hal ini," katanya.

Sementara itu, Camat Batuaji Ridwan mengatakan pihaknya sudah meminta Satpol PP untuk menertibkan kios liar tersebut. Dan ia mengaku tidak tahu kenapa satpol PP belum menertibkannya.

"Suratnya sudah kita sampaikan kepada Satpol PP. Di lokasi itu memang tidak bisa dibangun kios liar," katanya belum lama ini. (ian)



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

KIOS liar yang dibangun di lahan hijau dekat pasar seken Aviari, Batuaji, Kamis (5/4) lalu. Kios ini mulai ditempati dan beroperasi karena tak kunjung ditertibkan.

Harga Ikan Laut Naik

Diduga Faktor Cuaca

YASHINTA, Lubukbaja

HARGA beberapa komoditas makanan tercatat cukup tinggi. Tak hanya harga daging sapi dan ayam yang mahal, harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional juga mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang menduga, kenaikan harga ikan disebabkan karena faktor cuaca.

Pantauan *Batam Pos* di Pasar Tos 3000 Jodoh, harga ikan

selar yang biasanya Rp 40 ribu per kilogram (kg) juga mulai merangkak naik. "Harga selar Rp 50-55 ribu per kg, tergantung ukuran (ikan)," kata Ujang, penjual ikan di pasar tersebut, Senin (7/5).

Menurut dia, mahalnya harga ikan diduga karena sulitnya akses pedagang mendapatkan ikan. Apalagi, cuaca di lautan kerap tak bersahabat sehingga nelayan kerap gigit jari jika pulang melaut. "Ikan langka,

makanya mahal. Kami belinya mahal juga dari distributor ikan," terang Ujang.

Tak hanya ikan selar, harga ikan tongkol juga naik menjadi Rp 35 ribu per kg dari Rp 28 ribu per kg. Ikan benggol dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp 28 ribu per kg.

"Hampir semua jenis ikan naik harga. Kemungkinan bisa turun kalau hasil ikan banyak," imbuh Ujang.

Hal senada dikatakan Busman, pedagang ikan di Pasar Pujabahari Nagoya. Menurutnya, harga sejumlah ikan naik

sejak seminggu terakhir karena nelayan sulit mendapatkan ikan. Jika biasanya harga ikan selar Rp 45 ribu per kg, kini bahkan sudah ada yang mencapai Rp 60 ribu per kg.

"Harga ikan pada naik, hampir semua jenis ikan naik," imbuhnya. Di sisi lain, ia menampik jika kenaikan harga ikan dikarenakan hampir memasuki bulan puasa.

"Tak ada pengaruhnya bulan puasa sama ikan," tegas Busman.

Naiknya harga ikan tentu saja membuat warga mengeluh.

Pasalnya, berbagai komoditas terutama lauk pauk mengalami kenaikan harga dalam kurun sebulan terakhir.

"Padahal kalau ayam atau daging naik, mestinya harga ikan enggak ikut naik, jadi ada alternatif. Tapi kalau sekarang semua mahal, pusing kita," keluh Siti, warga Batuampar.

Ia berharap, ada upaya dari pemerintah agar harga bahan pokok bisa ditekan jelang masuknya bulan Ramadan. "Harusnya begitu, karena kan ini musiman, mestinya sudah bisa disiasati," katanya. ***

...atif Capai Rp 1,2 Miliar

Terkendala Audit

Sambungan **Hal.13**

kan pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pegawai mengenai pembayaran gaji tersebut.

Dia juga mengatakan sampai saat ini keuangan RSUD EF masih belum selesai diau-

dit BPK."Lebih lengkapnya tanyakan sama humas ya, biar dia yang jelaskan,"kata Ani.

Humas RSUD EF Novi yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban, saat didatangi ke kantornya pega-

wai yang ada di dalam ruangannya mengatakan bahwa humasnya sedang sakit. Pesan yang dikirimkan Tribun melalui WhatsApp belum mendapat jawaban sampai berita ini diturunkan. **(ian)**